

## DEKONSTRUKSI AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF PANCASILA

**Dwi Ekasari Harmadji**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wisnuwardhana, Malang

Email:dwiekasarihardmadji21@gmail.com

**Abstract,** *The purpose of writing this article is to deconstruct social responsibility accounting in the perspective of Pancasila. At present, the form of social responsibility accounting outcomes is the sustainability report (CSR). The results of this study are the need to increase the understanding of accounting / financial professionals / practitioners of sustainability reporting as the application of the substantive goals of the company concerned, and not a symbolic objective to obtain legitimacy from stakeholders. Increased understanding of spiritual conditions and aspects, economic aspects, social aspects and environmental aspects that must be disclosed in a full and transparent sustainability report, so that it is known by all stakeholders.*

**Keywords:** *Social Responsibility Accounting, Pancasila*

### LATAR BELAKANG

Konsep tanggung jawab sosial korporat (*Corporate Sosial Responsibility/CSR*) mempunyai sejarah yang panjang dan mengesankan dalam literatur manajemen (Carroll,1999). Sulit dipungkiri bahwa wacana CSR yang sebelumnya merupakan isu marginal kini telah menjelma menjadi isu sentral, makin populer dan bahkan ditempatkan di posisi yang kian terhormat (Wibisono, 2005). Di semua organisasi/industri/perusahaan telah memasukkan program CSR ke strategi bisnisnya, dimana mereka akan membagikan keberhasilan perusahaan dengan semua *stakeholder*, menciptakan persaingan dan nilai penyeimbang bagi investor, karyawan, negara dan masyarakat di sekitar wilayah operasinya, jika dilakukan di wilayah

Indonesia. Hal ini selaras dengan tujuan sila kelima dari dasar Negara RI: Pancasila yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

*Corporate sosial responsibility (CSR)* mewajibkan setiap perusahaan untuk melakukan pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan. Hal ini yang mendorong munculnya akuntansi pertanggungjawaban sosial sebagai jawaban atas kegagalan akuntansi konvensional mengakomodir kepentingan masyarakat secara luas. Hanya saja masih terdapat kendala yang krusial yaitu tidak adanya format laporan akuntansi pertanggungjawaban sosial yang baku berkaitan dengan usaha-usaha pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan.

Dalam melaksanakan kegiatan usaha operasionalnya, perusahaan tidak dapat terlepas dengan lingkungan

sosialnya. Keberadaan perusahaan di tengah-tengah lingkungan sosial dan masyarakat terikat dalam kontrak, dimana perusahaan berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban kontrak sosial yang pada umumnya merupakan transaksi-transaksi *non commercial*. Eksistensi perusahaan dalam masyarakat dapat memberikan aspek yang positif dan negatif. Di satu sisi, perusahaan menyediakan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat, namun di sisi lain tidak jarang masyarakat mendapatkan dampak buruk dari aktivitas bisnis perusahaan. Banyak kasus ketidakpuasan publik yang bermunculan, baik yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan, keamanan dan kualitas produk, serta eksploitasi besar-besaran terhadap energi dan sumber daya alam. Dalam perspektif tujuan perusahaan yang mengejar profit, dampak-dampak negatif yang ditimbulkan akibat operasional perusahaan bukan merupakan hal yang diperhitungkan. Hal tersebut disebabkan karena orientasi utama mereka adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien dengan mengabaikan efek yang ditimbulkannya.

Sejarah perkembangan akuntansi, yang berkembang pesat setelah terjadi revolusi industri, menyebabkan pelaporan akuntansi lebih banyak digunakan sebagai alat pertanggungjawaban kepada pemilik modal (*shareholders*) sehingga mengakibatkan orientasi perusahaan lebih berpihak kepada pemilik modal. Dengan keberpihakan perusahaan kepada pemilik modal mengakibatkan perusahaan melakukan eksploitasi sumber-sumber alam dan masyarakat

(sosial) secara tidak terkendali sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan alam dan pada akhirnya mengganggu kehidupan manusia.

Di dalam akuntansi konvensional, pusat perhatian yang dilayani perusahaan adalah *stockholders/ shareholders* dan *bondholders* sedangkan pihak yang lain sering diabaikan. Dewasa ini tuntutan terhadap perusahaan, untuk tidak hanya mementingkan kepentingan manajemen dan pemilik modal (investor dan kreditor) tetapi juga karyawan, konsumen, serta masyarakat.

Semakin besar suatu perusahaan, maka semakin besar perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial terhadap pihak-pihak di luar manajemen dan pemilik modal. Akan tetapi perusahaan kadangkala melalaikannya dengan alasan mereka tidak memberikan kontribusi terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Hal ini disebabkan hubungan perusahaan dengan lingkungannya bersifat *non reciprocal* yaitu transaksi antara keduanya tidak menimbulkan prestasi timbal balik. Namun, perubahan masyarakat yang semakin memahami hak-hak mereka mendorong timbulnya tuntutan-tuntutan terhadap kepedulian sosial perusahaan. Perusahaan diminta untuk bertanggungjawab atas penggunaan sumber daya yang diambil dari lingkungan sosial kepada lingkungan sosialnya atau masyarakat. Adanya masalah sosial dan lingkungan yang ditimbulkannya, maka sudah selayaknya entitas bisnis bersedia untuk menyajikan suatu laporan yang dapat mengungkapkan bagaimana kontribusi mereka terhadap berbagai permasalahan sosial yang terjadi di

sekitarnya. Namun, laporan tahunan yang selama ini dianggap sebagai media yang paling tepat untuk mengkomunikasikan berbagai informasi yang relevan dari manajemen perusahaan, tampaknya masih belum dimanfaatkan secara optimal untuk mengungkapkan masalah-masalah yang berhubungan dengan lingkungan sosial. Belum optimalnya pemanfaatan laporan tersebut, sangat mungkin disebabkan karena rendahnya kesadaran perusahaan dalam mengungkapkan permasalahan sosial dan lingkungan yang terjadi.

Rendahnya kesadaran perusahaan untuk melakukan pengungkapan masalah lingkungan dan sosial salah satunya dapat disebabkan karena sampai saat ini pengungkapan sosial merupakan suatu bentuk pengungkapan yang bersifat sukarela, sehingga timbul anggapan bahwa tidak menjadi soal apabila suatu perusahaan tidak melakukan pengungkapan sosial. Padahal, pengungkapan masalah sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh suatu perusahaan merupakan bentuk akuntabilitas perusahaan tersebut kepada publik dan juga sebagai usaha untuk menjaga eksistensi perusahaan tersebut di masyarakat.

Tuntutan terhadap perusahaan untuk memberikan informasi yang transparan, semakin memaksa perusahaan untuk memberikan informasi mengenai aktivitas sosialnya. Di Indonesia, hal ini diwajibkan dengan ditetapkannya UU Perseroan Terbatas, Pasal 74 mengenai kewajiban pelaksanaan *corporate social responsibility* (CSR). Pada intinya, CSR merupakan kewajiban setiap perusahaan untuk ikut serta dalam kegiatan yang bertujuan melindungi

serta meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan, di samping kegiatan-kegiatan bisnis yang bertujuan untuk keperluan perusahaan dengan tetap memenuhi hukum dan prinsip-prinsip ekonomi. Oleh karena itu dalam perkembangan sekarang ini akuntansi konvensional telah banyak dikritik karena tidak dapat mengakomodir kepentingan masyarakat secara luas, sehingga kemudian muncul konsep akuntansi pertanggungjawaban sosial.

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia memiliki sebuah ideologi yang disebut dengan Pancasila, jauh dari nilai-nilai kapitalisme. Hal ini sesuai dengan pemikiran dari Mubyarto (1987) yang menekankan unsur egalitarianisme yang diwujudkan dalam semangat kekeluargaan, cinta-mencintai, dan tenggang rasa dalam konsep perekonomian Pancasila. Hal senada juga diungkapkan Gunadi (1995) yang mengaitkan konteks kesejahteraan sosial dalam kaitannya dengan peradaban pada kutipan berikut ini:

Dengan peradaban dimaksudkan kondisi kesejahteraan sosial, suatu masyarakat dan bangsa dapat dikatakan beradab jika di dalamnya kesejahteraan umum dikenal dan dihargai, dan kehidupan sosial, ekonomi, seni, ilmu pengetahuan memperoleh kesempatan berkembang untuk membuahakan keuntungan-keuntungan *materill* dan *spiritual* bagi orang banyak.

Anehnya, pada tingkat sistem ekonomi dan khususnya dalam dunia akuntansi sendiri corak kapitalisme sangat kental, baik dalam tingkat

teori maupun tingkat praktis. Kamayanti (2012) dalam percakapan dialogis dengan mahasiswa mengatakan:

“Jika demikian, berarti kita semua telah lepas dari pemikiran naif bahwa akuntansi bebas nilai. Artinya kalian sudah sangat paham tentang keterkaitan nilai etis, ilmu dan perilaku. Begitu pula di akuntansi. Nah, bagaimana ini jika akuntansi kita, akuntansi Indonesia, tidak sesuai dengan nilai yang kita sebagai bangsa Indonesia anut?”

Definisi akuntansi yang penuh dengan unsur maskulinitas juga bercirikan adanya upaya untuk mengejar laba serta kapitalisasi modal. Triyuwono (2012) mengatakan:

“Pada skala mikro, kita akan melihat bahwa akuntansi positif merupakan anak dari sistem ekonomi kapitalistik. Ciri maksimalisasi laba dan akumulasi kapital merupakan identitas utama yang tidak dapat dipisahkan dari akuntansi. Maksimalisasi laba, misalnya akan terlihat pada *the bottom line* dari Laporan Rugi-Laba (*Income Statement*) dengan nama Laba Bersih (*net profit*). Laba bersih yang tinggi merupakan tujuan utama (manajemen) perusahaan yang juga menjadi kepentingan bagi pemilik perusahaan/pemegang saham (*shareholders*), investor, dan kreditor. Semakin tinggi angka akuntansi (*accounting number*) yang menempel pada laba bersih, maka semakin baik kinerja dari perusahaan yang

bersangkutan. Sedangkan ciri akumulasi kapital akan tampak pada Neraca dengan label Laba yang Ditahan yang merupakan bagian dari ekuitas (*Equity*), atau dilaporkan secara khusus dalam Laporan Laba yang Ditahan (*Retained Earnings Statement*). Atau, akumulasi *capital* itu berupa ekuitas itu sendiri beserta komponen-komponennya seperti modal saham (biasa atau preferen), agio/disagio saham, laba yang ditahan, dan lain-lainnya. Semakin besar komposisi ekuitas ini terhadap jumlah utang, maka semakin aman investasi yang ditanamkan oleh investor (kreditor) pada perusahaan. Ini merupakan ilustrasi sederhana dari dua ciri utama akuntansi yang menonjol.”

Unsur maskulinitas dalam definisi akuntansi yang merupakan ciri khas dari paradigma Positivisme (Syafe'ie, 2000) membuat dunia akuntansi itu sendiri terkukung dalam sifat-sifat yang bersifat materialistik. Pada akhirnya, manusia yang menjadi pelaku utama dalam dunia akuntansi terjebak dalam penjara dosa. Penggambaran dosa tersebut oleh Achsin (2006) sangat jelas tergambar dalam kutipan berikut:

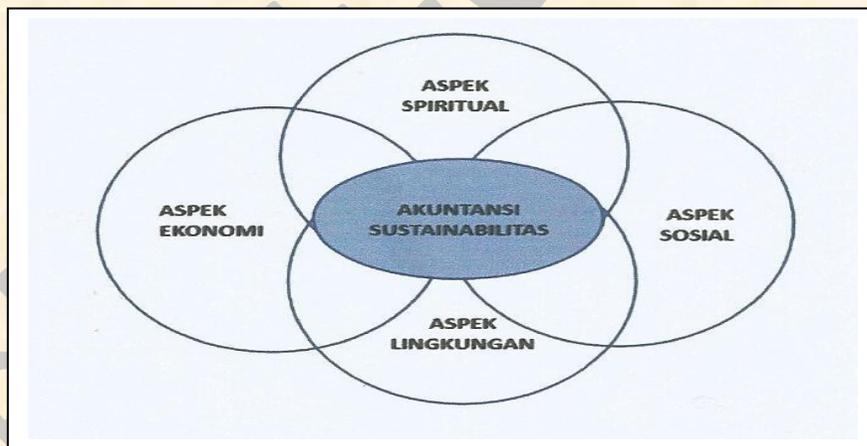
“Cinta dan harmoni itu, yang seharusnya dibangun antar sesama manusia, telah tereduksi dan tereliminasi secara nyata. Manusia yang dianggap memiliki kualitas pribadi yang *prima-imago dei* saat ini memperoleh level terendahnya. Positivisme mempertontonkan sikap dan gaya hidup individualistik, hedonistik, materialistik, mekanistik dan

egosentrik yang berseberangan dengan cinta dan harmoni. Pada gilirannya, manusia modern kesulitan dalam menciptakan harmonisasi. Abad modern, adalah abad yang tanpa cinta. Rasa cinta telah digantikan dengan sifat-sifat buruk: iri, dengki, penuh prasangka buruk dan cenderung merasa benar sendiri. Di samping itu, sebagai akibat lanjutannya adalah manusia juga cenderung menjadi: congkak, sombong, angkuh dan merasa akalnya mampu menjangkau dan mengatasi kenyataan dan kesulitan hidup.”

Menarik untuk dicermati apakah tujuan dari akuntansi hanya untuk kepentingan investasi semata?

Melihat pernyataan dari Mulawarman (2008) yang menyatakan bahwa akuntabilitas bukan hanya untuk kepentingan pemilik dan kreditor namun juga kepada masyarakat dan lingkungan menimbulkan konsekuensi bahwa fokus dari pemikiran akuntansi bukan hanya kepada konsep keuntungan namun juga pertanggungjawaban kepada unsur-unsur sosial. Dalam tataran yang lebih luas, akuntansi juga harus memiliki pertanggungjawaban kepada Tuhan, sebab baik manusia dan lingkungan merupakan ciptaan dari Tuhan.

Sukoharsono (2010) menggambarkan keterkaitan aspek-aspek tersebut dalam gambar berikut ini:



**Gambar 1.1 Akuntansi Sustainabilitas dengan 4 (Empat) Aspek Organisasi: Ekonomi, Sosial, Lingkungan, dan Spiritual**

Sumber: Sukoharsono (2010)

Dengan digambarkannya definisi akuntansi berdasarkan perspektif Pancasila, maka diharapkan perusahaan tidak akan memiliki pola pikir untuk mencari

keuntungan sebesar-sebesar yang diukur dari aspek moneter. Dalam konteks, makro pendefinisian akuntansi berdasarkan perspektif Pancasila juga akan membantu

perusahaan dalam memenuhi aspek pertanggungjawaban berdasarkan keempat aspek yang telah digambarkan. Aspek spiritual, sosial, ekonomi, dan lingkungan tergambar jelas dalam kelima sila. Sebagaimana keempat aspek yang tidak mungkin terpisahkan satu sama lain demikian juga pertanggungjawaban perusahaan berdasarkan Pancasila tidak bisa hanya memandang satu atau dua sila saja. Masing-masing sila memiliki unsur-unsur yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Hal ini tentu saja berbeda dengan unsur maskulinitas dalam definisi akuntansi yang berbasis pada kapitalisme sebagaimana yang telah digambarkan oleh penulis bahwa laba dan kapitalisasi modal masih menjadi fokus utama dalam pembuatannya.

Sila-sila Pancasila yang berbunyi: Ketuhanan Yang Maha Esa (sila pertama), Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (sila kedua), Persatuan Indonesia (sila ketiga) dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan (sila keempat), serta Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia (sila kelima) merupakan upaya untuk menangkal serangan imperialisme yang notabene merupakan buah dari kapitalisme itu sendiri (Soekarno, 1964) dan dapat merampas kedaulatan rakyat. Nilai-nilai Pancasila yang merupakan wujud dari hubungan pertanggungjawaban manusia terhadap Tuhan dan sesama mampu menghasilkan suatu pribadi humanis sehingga tidak hanya berorientasi kepada pemikiran pribadi

dan rasional semata namun mampu melihat unsur-unsur sosial yang merupakan pandangan yang bertentangan dengan kapitalisme. Implikasinya, akuntansi harus dilandasi dengan semangat Pancasila sehingga terwujud suatu masyarakat yang madani. Oleh karena itu, definisi akuntansi pertanggungjawaban sosial juga harus mengikuti nilai-nilai dalam Pancasila sehingga dapat terwujud laporan akuntansi sosial yang tidak memikirkan nilai egoisme semata, namun juga mengakomodir seluruh kepentingan rakyat dan juga Tuhan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui atau mendeskripsikan dekonstruksi akuntansi pertanggungjawaban sosial dalam perspektif Pancasila.

## **LANDASAN TEORI**

### **Konsep Akuntansi Pertanggungjawaban**

Informasi akuntansi pertanggungjawaban adalah informasi aktiva, pendapatan dan atau biaya yang dihubungkan dengan aktivitas penambahan dan bukan penambahan nilai. Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan keluaran system akuntansi pertanggungjawaban. Konsep informasi akuntansi pertanggungjawaban telah mengalami perkembangan, sejalan dengan metode pengendalian biaya yang digunakan dalam perusahaan.

Sistim akuntansi pertanggungjawaban tradisional menghubungkan informasi akuntansi manajemen dengan wewenang yang dimiliki manajer. Wewenang di delegasikan dari

manajer atas kemandirian di bawahnya, dan pendelegasian wewenang ini menuntut manajer bawah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan wewenang kepada manajer atasnya.

Wewenang yang dimiliki oleh seorang manajer menjadikannya dalam posisi dapat mengendalikan sesuatu yang berada di bawah wewenangnya. Oleh karena itu, dalam hubungannya dengan wewenang manajer tertentu, aktiva, pendapatan dan biaya dapat dikelompokkan menjadi dua golongan yaitu :

- 1) Aktiva, pendapatan dan biaya terkendalikan dan
- 2) Aktiva, pendapatan dan biaya tidak terkendalikan.

Aktiva, pendapatan, dan biaya terkendalikan adalah aktiva, pendapatan dan biaya yang dapat secara signifikan dipengaruhi oleh seorang manajer dalam jangka waktu tertentu.

Dalam organisasi, pada dasarnya tidak ada aktiva, pendapatan dan biaya yang tidak terkendalikan. Aktiva, pendapatan dan biaya yang tidak terkendalikan oleh manajer tertentu, pasti dapat dikendalikan oleh manajer di atasnya atau manajer lainnya dalam organisasi. Suatu aktiva, pendapatan dan biaya yang tidak terkendalikan oleh seorang manajer bagian mungkin merupakan aktiva, pendapatan dan biaya terkendalikan bagi manajer departemen yang membawahnya

atau manajer bagian yang lain dalam organisasi.

### **Aktiva, pendapatan dan biaya yang terkendalikan**

Yaitu aktiva, pendapatan dan biaya yang secara signifikan dipengaruhi oleh seorang manajer dalam jangka waktu tertentu.

#### **Aktiva yang terkendalikan**

Aktiva terkendalikan bagi seorang manajer pusat pertanggungjawaban adalah :

- Aktiva yang pemerolehan & penggunaannya berada dibawah wewenang manajer pusat pertanggungjawaban
- Aktiva yang penggunaannya berada didalam wewenang manajer pusat pertanggungjawaban, kadangkala pemerolehan aktiva suatu pusat pertanggungjawaban berada didalam wewenang manajer puncak

#### **Pendapatan yang terkendalikan**

Dapat diperoleh atau tidaknya pendapatan oleh suatu pusat pertanggungjawab sangat tergantung atas kemampuan pusat pertanggungjawaban yang bersangkutan. Karena pendapatan mudah diidentifikasi dengan manajer yang bertanggung jawab untuk memperolehnya.

#### **Biaya yang terkendalikan**

Biaya-biaya yang terkendalikan oleh manajer pusat pertanggungjawaban yang disajikan dalam laporan biaya dan dimintakan pertanggungjawabannya. Pedoman untuk menetapkan apakah suatu biaya dapat dibebankan sebagai tanggung jawab seorang manajer pusat pertanggungjawaban adalah sbb:

- 1) Jika seseorang manajer memiliki wewenang , baik dalam pemerolehan maupun penggunaan jasa, ia harus dibebani dengan biaya jasa tersebut.

Contoh : manajer pemasaran yang mempunyai wewenang memutuskan media promosi dan jumlah biayanya, bertanggung jawab penuh terhadap terjadinya biaya.

- 2) Jika seorang manajer dapat secara signifikan mempengaruhi jumlah biaya tertentu melalui tindakannya sendiri, ia dapat dibebani dengan biaya tersebut Seorang manajer mungkin tidak mempunyai wewenang dalam memutuskan pemerolehan barang dan jasa baik harga maupun jumlahnya namun dapat secara signifikan mempengaruhi jumlah pemakaiannya.

Contoh : Harga dan jumlah bahan baku yang dibeli ditentukan oleh manajer bagian pembelian, sedangkan pemakaiannya ditentukan oleh bagian produksi. Dengan menggunakan harga standar, manajer pembelian bertanggung jawab terhadap harga

pemerolehan bahan baku. Sedangkan manajer produksi bertanggung jawab terhadap biaya bahan baku.

- 3) Meskipun seorang manajer tidak dapat secara signifikan mempengaruhi jumlah biaya tertentu melalui tindakannya sendiri, ia juga dapat dibebani biaya tersebut, jika manajemen puncak menghendaki agar manajer tersebut membantu manajer lain bertanggung jawab untuk mempengaruhi biaya tersebut.

Contoh : Biaya reparasi dan pemeliharaan merupakan tanggung jawab bagian bengkel. Namun ada dua faktor yang mempengaruhi biaya tersebut : (1) efisiensi pemakaian tenaga kerja bengkel yang menjadi tanggung jawab manajer bengkel. (2) Pemakaian mesin dan peralatan yang menjadi tanggung jawab manajer bagian produksi.

Akuntansi pertanggungjawaban sosial merupakan

### **Aktiva, pendapatan dan biaya yang tidak terkendalikan**

Aktiva, pendapatan dan biaya yang tidak

terkendalikan tidak tepat untuk menggambarkan aktiva, pendapatan dan biaya yang tidak dapat dipengaruhi secara signifikan oleh manajer tertentu. Tetapi istilah yang tepat yaitu “terkendalikan oleh seseorang” (*controllable by someone*) dan “terkendalikan oleh manajer lain” (*controllable by others*).

Pemisahan aktiva, pendapatan dan biaya ke dalam aktiva, pendapatan, dan biaya yang terkendalikan dan tidak terkendalikan selalu berhubungan dengan :

#### 1) Tingkat manajemen

Dalam organisasi, pada dasarnya tidak ada aktiva, pendapatan dan biaya yang tidak terkendalikan. Aktiva, pendapatan dan biaya yang tidak terkendalikan oleh manajer tertentu, pasti dapat dikendalikan oleh manajer lain atau manajer di atasnya dalam organisasi. Aktiva, pendapatan dan biaya yang tidak terkendalikan oleh manajer tertentu, atau oleh manajer lain atau manajer di atasnya merupakan aktiva, pendapatan dan biaya yang dapat terkendalikan oleh oleh manajer departemen yang membawahnya atau manajer lain dalam organisasi.

#### 2) Jangka waktu

Dalam jangka waktu yang cukup panjang, semua aktiva, pendapatan dan biaya akan terkendalikan oleh seseorang dalam organisasi, sebaliknya dalam jangka pendek hanya sedikit aktiva, pendapatan dan biaya yang dapat dikendalikan.

#### **Anggaran Biaya Sebagai Tolak Ukur Pengendalian Biaya**

Untuk tujuan pengendalian biaya :

- 1) Organisasi harus disusun sedemikian rupa sehingga jelas wewenang dan tanggungjawab tiap-tiap manajer. Anggaran menghendaki adanya organisasi yang baik, jika terjadi sesuatu yang yang tidak sesuai dengan yang direncanakan dalam anggaran, akan dengan mudah tahu siapa yang bertanggung jawab.
- 2) Anggaran biaya harus disusun sesuai dengan tingkat manajemen dalam organisasi. Tiap-tiap manajer harus mengajukan rancangan anggaran biaya yang berada dibawah tanggungjawabnya kemudian dikombinasikan dan diselaraskan satu sama lain oleh komite anggaran. Jika ada perubahan terhadap

rancangan anggaran tersebut maka harus dirundingkan dan diberitahukan kepada manajer penyusun anggaran biaya sehingga menciptakan peran serta dan komitmen dalam mencapai target yang ditetapkan.

- 3) Setiap manajer berpartisipasi dalam penyusunan anggaran oleh karena itu masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban mengenai realisasi anggarannya.

### **Terkendalikan Biaya**

#### **Versus Variabilitas Biaya**

Variabilitas biaya adalah perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan.

Jika terkendalikan biaya dihubungkan dengan perubahan volume kegiatan. Biaya dapat dikelompokkan menjadi dua golongan:

- 1) Biaya dalam jangka pendek tidak dapat dipengaruhi secara signifikan oleh manajer lain yang berwenang. Biaya ini dibagi menjadi : *engineered variable costs* dan *committed fixed costs*.

Dalam jangka pendek, *engineered variable costs* tidak dipengaruhi secara signifikan oleh manajer pusat

pertanggungjawaban produksi. Misalnya, karena jenis biaya ini sangat ditentukan oleh teknologi.

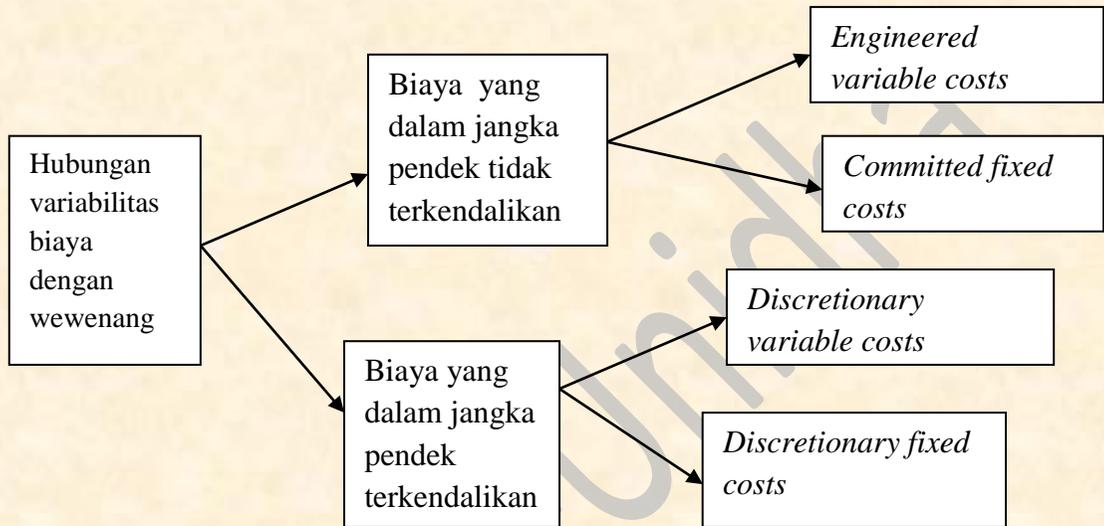
Contoh : setiap mobil yang dirakit oleh departemen perakitan harus dipasang 5 roda, sehingga biaya roda adalah *engineered cost* didepartemen tersebut. Bagi manajer departemen perakitan, biaya roda tersebut merupakan biaya tidak terkendalikan, karena biaya wewenang yang dimiliki oleh manajer departemen perakitan tidak cukup untuk mempengaruhi secara signifikan besarnya biaya tersebut.

*Committed fixed costs* adalah biaya tetap yang timbul dari pemilikan pabrik,ekuiipmen. Biaya ini tetap dikeluarkan guna mempertahankan kemampuan perusahaan dalam memenuhi tujuan-tujuan jangka panjang. Contoh: biaya depresiasi,pajak bumi dan bangunan,biaya asuransi,sewa dll.

- 2) Biaya dalam jangka pendek dapat dipengaruhi secara signifikan oleh manajer lain yang berwenang. Biaya ini adalah biaya kebijakan. Biaya ini dibagi menjadi :

*Discretionary variable costs* dan *Discretionary fixed costs*. Biaya ini berperilaku variabel atau tetap atas kebijakan manajemen, sehingga dalam jangka pendek

biaya ini secara signifikan dipengaruhi oleh wewenang yang dimiliki manajemen.



**Gambar 2. Hubungan Biaya Terkendalikan dengan Variabilitas Biaya**

**Manfaat Informasi Akuntansi Pertanggungjawaban**

Sistem akuntansi pertanggungjawaban merupakan tahap perkembangan mutakhir cara pengendalian biaya yang tidak hanya terbatas pada pengendalian biaya produksi saja, namun meliputi pengendalian biaya nonproduksi. Dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban, informasi akuntansi dihubungkan dengan manajer yang memiliki wewenang terjadinya informasi tersebut untuk dimintakan pertanggungjawaban kepada manajer yang bersangkutan.

Sistem akuntansi pertanggungjawaban dapat dibagi 2 tahap perkembangan:

**1) Akuntansi pertanggungjawaban tradisional**

Suatu sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya dan atau pendapatan dilakukan sesuai dengan pusat pertanggungjawaban dalam organisasi, dengan tujuan agar dapat ditunjuk orang atau kelompok orang yang bertanggungjawab atas penyimpanan biaya atau pendapatan yang dianggarkan.

## 2) Akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas (*activity-based responsibility accounting*)

Suatu sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan & pelaporan biaya dilakukan menurut aktivitas penambah dan bukan penambah nilai (*Value & Non Value Added Activities*). Digunakan dalam menghadapi lingkungan manufaktur maju (*advanced manufacturing environment*). Informasi akuntansi pertanggungjawaban dapat berupa informasi historis yang berupa aktiva, pendapatan, biaya masa lalu dapat pula berupa informasi masa yang akan datang.

Informasi akuntansi pertanggungjawaban berupa informasi masa yang akan datang bermanfaat untuk penyusunan anggaran. Sedangkan informasi akuntansi pertanggungjawaban berupa informasi masa yang lalu bermanfaat untuk penilai kinerja manajer pusat pertanggungjawaban dan pemotivasi manajer

Dalam *Activity-based responsibility system*, informasi akuntansi manajemen-terutama biaya, dihubungkan dengan aktivitas-penambah dan bukan penambah nilai. Informasi ini bermanfaat bagi manajemen :

- 1) Mengelola aktivitas, dengan cara mengarahkan usaha manajemen dalam mengurangi dan akhirnya menghilangkan biaya bukan penambah nilai (*non value added costs*)
- 2) Memantau efektivitas program pengelolaan aktivitas

### **Pokok Bahasan Informasi akuntansi pertanggungjawaban sosial sebagai pemantau efektivitas program pegelolaan aktivitas sosial**

Dalam lingkungan manufaktur dan perusahaan yang maju, manajemen dituntut untuk melaksanakan penyempurnaan aktivitas secara berkesinambungan, agar perusahaan memiliki daya saing dalam jangka panjang. Dengan demikian manajemen memerlukan informasi biaya aktivitas untuk memantau secara berkesinambung program pengelolaan aktivitas. Dengan menyajikan informasi biaya yang dipisahkan kedalam biaya penambah dan bukan penambah nilai dengan perbandingan dari tahun ke tahun, manajemen dapat:

- 1) Memantau efektivitas program pengelolaan aktivitas  
Untuk mengurangi dan akhirnya menghilangkan aktivitas bukan penambah nilai yang diwujudkan dalam bentuk pengurangan biaya. Manajemen memerlukan perbandingan biaya penambah dan bukan penambah nilai dari tahun ketahun.
- 2) Merumuskan keputusan-keputusan strategik  
Prorgam pengelolaan aktivitas memberi gambaran berupa penghematan biaya yang dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu, merumuskan keputusan strategik, seperti penentuan harga jual, pemilihan teknologi manufaktur untuk menjadikan aktivitas penambah nilai lebih efisien.

Perusahaan pun harus dapat mempertanggungjawabkan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) nya melalui akuntansi pertanggungjawaban sosial yang menjadi wujud pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*). Laporan akuntansi pertanggungjawaban sosial ini harus mencakup semua aspek yaitu aspek lingkungan, aspek ekonomi, dan aspek sosial.

### **Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial dan Perspektif Pancasila**

Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial yang lebih lengkap bila mencakup aspek lingkungan, aspek ekonomi dan aspek sosial dalam perspektif Pancasila, karena Pancasila sebagai dasar negara memuat nilai-nilai luhur sesuai dengan kebutuhan *stakeholder* (pemangku kepentingan). Output dari Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial (APS) adalah Laporan Keberlanjutan SR (*Sustainability Reporting*) yang dibuat perusahaan dan menyajikan data-data akuntansi dan non akuntansi.

### **METODE**

#### **Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif posmodern. Penekanan posmodern pada makna dekonstruksi, sebab dekonstruksi tersebut merupakan wujud bangunan teori yang baru dari realitas makna yang ada.

Menurut Triyuwono (2012) perbedaan makna terhadap sebuah simbol antara individu satu dan individu lainnya terjadi karena adanya perbedaan pada “diri” individu tersebut yang dipengaruhi oleh dua hal, yaitu faktor internal individu dan faktor eksternal (perkembangan yang berada di luar diri seseorang). Faktor internal berasal dari dalam diri individu berupa: kepentingan, motivasi, ilmu pengetahuan dan perspektif. Faktor eksternal yaitu keberadaan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, keadaan ekonomi, sosial dan politik dimana seseorang itu berada. Artinya jika dua faktor tersebut berubah, maka pemaknaan juga akan mengalami perubahan.

#### **Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian ini data yang diteliti adalah data lisan dan tulisan. Untuk mendapatkan data dibutuhkan alat bantu berupa daftar pertanyaan, *recorder handphone* dan kamera.

Daftar pertanyaan berisi pertanyaan-pertanyaan yang digunakan dalam metode wawancara. Recorder digunakan untuk merekam ungkapan dan argumen yang dikemukakan oleh informan. Hasil rekaman kemudian ditranskripsikan melalui pencatatan sehingga memudahkan untuk mengelompokkan data. Kamera digunakan untuk mengambil gambar yang terkait dengan aktivitas yang dilakukan peneliti dalam mencari data kepada informan.

Penelitian melalui tahapan analisis: reduksi data dan pengkodean data, tematisasi, penyajian data, indeksikalitas, reflektivitas dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, pengamatan dan dokumentasi.

#### **Data dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah langsung oleh peneliti dari tempat yang dijadikan penelitian. Data yang dimaksud yaitu data hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kepada staf yang berwenang pada organisasi yang akan penulis teliti.
- b. data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagan organisasi bank serta bukti foto, rekaman suara pada saat wawancara dan bukti-bukti pendukung lainnya.

### **Prosedur Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2011, 224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi alamiah), sumber data primer. Dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi tersamar. Observasi tersamar yakni peneliti tidak terus terang dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Kemungkinan kalau dilakukan dengan terus terang, maka peneliti tidak akan diijinkan untuk melakukan observasi maupun penelitian dan hasil observasi dikhawatirkan terjadi bias atau tidak menunjukkan kondisi yang sesungguhnya.

Wawancara yang penulis gunakan yakni wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Wawancara adalah prosedur untuk mendapatkan informasi dan data langsung dari sumber pertama, disamping itu wawancara adalah prosedur untuk mendapat penjelasan serta kejelasan atas data yang diperoleh dari pengamatan.

Menurut Sekaran (2006:71) pewawancara harus memahami sepenuhnya mengenai penelitian dan dilatih mengenai cara untuk memulai wawancara, bagaimana meneruskan pertanyaan, bagaimana memotivasi informan untuk menjawab, apa yang perlu digali dalam jawaban, dan bagaimana menutup wawancara.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan hal yang penting tentang apa yang dipelajari dan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Penulis dalam karya ilmiah ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Menurut Leksono (2013:177) peneliti sebagai *human instrument* berperan aktif memberikan makna atas data dan informasi; karena data dan informasi itu baru mempunyai arti dan berarti ketika telah diterakan makna atas sesuatu fakti. Seperangkat fakta, dimana pun dan kapan pun selalu ada; ketikakemudian dipandang sebagai peristiwa ekonomi maka itu adalah dikarenakan ditafsirartikan sebagai fenomena yang mengandung sifat dan perilaku ekonomi, walaupun oleh seseorang lain yang berlatar belakang kompetensi sosial juga dapat dipandang sebagai fenomena sosial;

dan sedangkan bagi seorang ahli hukum, fakta itu tentunya akan diinterpretasikan sebagai masalah hukum.

## HASIL PENELITIAN

### Penentuan Informan

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif, maka peneliti melakukan penentuan total informan sejumlah 12 (dua belas) orang, dengan rincian: informan utama (*key-informan*) sebanyak 8 (delapan) orang dan *co-informan* sebanyak 4 (empat) orang. *Key-informan* yang dipilih merupakan pegawai tetap dari 2 (dua) Perusahaan Modal Asing (PMA) di Pasuruan dan 4 (empat) dari Perusahaan Nasional dengan pangkat *senior manager* dan berpengalaman serta mengetahui secara mendalam pekerjaan akunting dan keuangan di perusahaannya.

*Co-informan* merupakan *senior manager* di kantor akuntan publik yang juga mengetahui pekerjaan akunting dan auditing di kantornya. Kantor Akuntan Publik (KAP) dipilih untuk lokasi penelitian, karena KAP tersebut memberikan jasa auditing, review dan asuransi. Mereka bisa memberikan masukan untuk laporan keberlanjutan (*Sustainability Reporting/SR*) yang merupakan output dari proses akuntansi pertanggungjawaban sosial yang sesuai dengan perspektif Pancasila. Rincian informan menggunakan inisial nama karena kerahasiaan perusahaan yang menjadi syarat informan mau memberikan informasi, antara lain sebagai berikut:

**Tabel 1. Informan penelitian**

No	Nama Informan	Keterangan	Lokasi Perusahaan
1.	Ibu L/ Manajer Akunting/ Usia 45 thn	<i>Key-informan</i>	PT. DS, Jakarta
2.	Bp. S/Manajer Keuangan/Usia 48 thn	<i>Key-informan</i>	PT. PS, Pasuruan
3.	Bp. E/Manajer Keuangan/Usia 49 thn	<i>Key-informan</i>	PT. UV, Jakarta
4.	Ibu D/Manajer Akunting/ Usia 44 thn	<i>Key-informan</i>	PT. BM, Jakarta
5.	Bp. F/Manajer Keuangan/ Usia 47 thn	<i>Key-informan</i>	PT. WK, Jakarta
6.	Bp. H/Manajer Keuangan/ Usia 46 thn	<i>Key-informan</i>	PT. BP, Jakarta
7.	Bp. I/Manajer Akunting/ Usia 45 thn	<i>Key-informan</i>	PT. BN, Jakarta
8.	Ibu H/Manajer Akunting/ Usia 46 thn	<i>Key-informan</i>	PT. BR, Jakarta
9.	Bp. D/ Senior Manager/ Usia 51 thn	<i>co-informan</i>	KAP D, Jakarta
10.	Ibu R/ Senior Manager/ Usia 46 thn	<i>co-informan</i>	KAP S, Jakarta
11.	Ibu M/ Senior Manager/ Usia 45 thn	<i>co-informan</i>	KAP H, Jakarta
12.	Bp. Z/ Senior Manager/ Usia 50 thn	<i>co-informan</i>	KAP A, Jakarta

### Hasil Wawancara

Wawancara dilakukan secara semi terstruktur dan *natural setting* dari sumber data primer dengan memakai teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi tersamar yang diperoleh dari informan. Peneliti

dengan mudah bisa mewawancarai informan *key-informan* dan *co-informan* karena memiliki relasi yang baik, sehingga mereka mau memberikan informasi secara lengkap. Observasi tersamar ini memudahkan peneliti untuk menggal

informasi dari para informan, sehingga tidak terdapat penghalang (*barrier*) dalam melakukan pengamatan. Kondisi ini dilakukan untuk menghindari data yang dirahasiakan oleh informan, sehingga dikhawatirkan hasil observasi dan wawancara tidak menunjukkan kondisi yang sesungguhnya di lapangan. Hal ini mengakibatkan terjadinya *bias* pada penelitian dengan metode kualitatif.

Informan yang tidak mau berterus terang, akan menutupi keadaan serta pemahaman makna yang sesungguhnya dari sudut pandang para profesional terhadap Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial. Tidak adanya penghalang (*barrier*) akan membuat para informan bercerita dengan lepas bebas dan informasi mengalir kepada peneliti mengenai pemahaman profesional/informan terhadap dekonstruksi akuntansi pertanggungjawaban sosial dalam perspektif Pancasila.

Hasil wawancara menunjukkan pemahaman para profesional yang diwakili oleh para informan mengenai makna laporan akuntansi pertanggungjawaban sosial (APS) dalam perspektif Pancasila. Mereka sependapat dan paham akan laporan *SR* yang sempurna adalah harus sesuai dengan tujuan substantifnya yaitu: memenuhi kepentingan semua *stakeholder* (pemangku kepentingan), sehingga harus sesuai dengan semua sila dalam Pancasila.

Para Informan menyatakan bahwa laporan *SR* yang ada sekarang

masih tidak sesuai dengan tujuan substantifnya. Output akuntansi pertanggungjawaban sosial yang dituangkan dalam laporan keberlanjutan (*SR*) yang ada sekarang, masih bertujuan simbolik untuk mendapatkan legitimasi dan reputasi yang baik bagi perusahaan yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena laporan *SR* yang masih bersifat sukarela (*voluntary*).

Laporan *SR* yang tidak diwajibkan bagi semua perusahaan yang ada di Indonesia, mengakibatkan banyak perusahaan melakukan akuntansi pertanggungjawaban sosial (APS) yang melenceng dari perspektif Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia. Kondisi tersebut tercermin dalam wawancara yang terjadi antara peneliti dan para informan.

Tekanan dan pengawasan dari pemerintah yang masih terbatas, menyebabkan perusahaan masih belum bisa memenuhi kepentingan *stakeholder*-nya. Bukti nyata terlihat dari banyaknya perusahaan pertambangan dan perkebunan yang masih merusak lingkungan serta belum memberikan manfaat secara langsung bagi pemberdayaan masyarakat sekitar. Adanya kesenjangan sosial dan kesenjangan kesejahteraan antara perusahaan dan masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan. Ini merupakan bukti pelanggaran sila kelima dari Pancasila (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia). Adanya ketidakadilan sosial karena belum

adanya kontribusi perusahaan untuk kesejahteraan masyarakat sekitarnya.

Pelanggaran sila kesatu (Ketuhanan Yang Maha Esa) dan sila kedua (Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab) dari Pancasila adalah keberadaan Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang mempekerjakan banyak tenaga kerja asing (TKA) dari negaranya dengan membawa ajaran agama dan budayanya yang bertentangan dengan masyarakat sekitar. Kondisi ini membuat ketidaknyamanan masyarakat sebagai *stakeholder* dan bisa terjadi pertentangan antara perusahaan dan masyarakat sekitar perusahaan.

Pelanggaran sila ketiga dari Pancasila, yaitu: Persatuan Indonesia, dibuktikan dengan keberadaan perusahaan PMA yang mengadu domba antar suku yang berada disekitar perusahaan tersebut. Suku yang satu dengan suku yang lain

dipengaruhi untuk berkelahi, sehingga perusahaan mendapatkan manfaat tidak diganggu oleh suku/komunitas masyarakat yang menentanginya karena mereka sibuk berkelahi sendiri.

Pelanggaran sila keempat dari Pancasila, yaitu: Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam

Permusyawaratan/Perwakilan. Hal ini dibuktikan oleh tidak adanya musyawarah antar perusahaan dan masyarakat/komunitas di sekitar keberadaan perusahaan tersebut. Kebijakan perusahaan banyak yang merugikan masyarakat sekitar, seperti pembabatan hutan untuk dijadikan perkebunan sawit, perusahaan membeli atau menyewa tanah milik masyarakat sekitar dengan harga murah dan kondisi ini dipaksakan untuk diterima oleh masyarakat sekitar perusahaan.

**Tabel 2. Hasil Wawancara dengan Key-Informant dan Co-Informant**

<b>Informan</b>	<b>Coding</b>	<b>Pemaknaan</b>
Ibu L/ Manajer Akunting/ Usia 45 thn/PT.DS Jakarta/ <i>Key-Informant</i>	“Saya bekerja sebagai Manajer Akunting sejak tahun 2009 dan Laporan <i>SR</i> hanya untuk dimanfaatkan perusahaan mengurangi beban pajak”	APS belum sesuai dengan perspektif Pancasila
Bp. S/Manajer Keuangan/Usia 48 thn/ PT.PS, Pasuruan/ <i>Key- Informant</i>	“Saya bekerja sebagai Manajer Keuangan di PT.PS tahun 2015 dan Laporan <i>SR</i> dibuat untuk pencitraan perusahaan saja”	APS belum sesuai dengan perspektif Pancasila

Lanjutan tabel 2. Hasil Wawancara dengan *Key-Informant* dan *Co-Informant*

Bp. E/Manajer Keuangan/Usia 49 thn/ PT. UV Jakarta/ <i>Key-Informant</i>	“Saya bekerja sebagai Manajer Akunting sejak tahun 2009 dan Laporan <i>SR</i> hanya untuk dimanfaatkan perusahaan mengurangi beban pajak”	APS belum sesuai dengan perspektif Pancasila
Ibu D/Manajer Akunting/Usia 44 thn/ PT. BM, Jakarta/ <i>Key-Informant</i>	“ Saya kerja mulai tahun 2011 dan Laporan <i>SR</i> untuk lapor kegiatan CSR yang biayanya mengurangi pajak.”	APS belum sesuai dengan perspektif Pancasila
Bp. F/Manajer Keuangan/Usia 47 thn/ PT. WK, Jakarta/ <i>Key-Informant</i>	“Saya kerja sejak tahun 2013 dan laporan <i>SR</i> untuk legitimasi perusahaan.”	APS belum sesuai dengan perspektif Pancasila
Bp. H/Manajer Keuangan/Usia 46 thn/ PT. BP, Jakarta/ <i>Key-Informant</i>	“Saya kerja sejak tahun 2010 dan laporan <i>SR</i> untuk meningkatkan reputasi perusahaan.”	APS belum sesuai dengan perspektif Pancasila
Bp. I/Manajer Akunting/Usia 45 thn/ PT. BN, Jakarta/ <i>Key-Informant</i>	“Saya kerja sejak tahun 2012 dan laporan <i>SR</i> dibuat untuk meningkatkan citra perusahaan sehingga harga sahamnya juga akan naik.”	APS belum sesuai dengan perspektif Pancasila
Ibu H/Manajer Akunting/Usia 46 thn, PT. BR, Jakarta/ <i>Key-Informant</i>	“Saya kerja sejak tahun 2008 dan laporan <i>SR</i> dilaporkan bukan untuk tujuan substantif tapi simbolik.”	APS belum sesuai dengan perspektif Pancasila
Bp. D/ Senior Manager/Usia 51 thn/ KAP D, Jakarta/ <i>Co-Informant</i>	“Saya kerja sejak tahun 2014 dan laporan <i>SR</i> hanya laporan sukarela sehingga disajikan sebagai laporan kegiatan amal perusahaan untuk pencitraan perusahaan tersebut.	APS belum sesuai dengan perspektif Pancasila
Ibu R/ Senior Manager/Usia 46 thn/ KAPD S, Jakarta/ <i>Co-Informant</i>	“Saya kerja sejak tahun 2011 dan laporan <i>SR</i> masih bersifat sukarela, sehingga dibuat perusahaan untuk mengurangi pajak dan laba perusahaan akan meningkat.”	APS belum sesuai dengan perspektif Pancasila
Ibu M/ Senior Manager/Usia 45 thn/ KAPD H, Jakarta/ <i>Co-Informant</i>	“Saya kerja sejak tahun 2008 dan laporan <i>SR</i> merupakan laporan sukarelah yang dikerjakan untuk tujuan reputasi perusahaan.”	APS belum sesuai dengan perspektif Pancasila
Bp. Z/ Senior Manager/Usia 50 thn/ KAPD A, Jakarta/ <i>Co-Informant</i>	“Saya kerja sejak tahun 2009 dan laporan <i>SR</i> yang bersifat <i>voluntary</i> hanya dibuat untuk tujuan simbolik perusahaan.”	APS belum sesuai dengan perspektif Pancasila

## PEMBAHASAN

Pernyataan-pernyataan yang tertuang dalam *coding* di label tersebut, menunjukkan bahwa

kegiatan dan pernyataan data-data hasil wawancara tersebut diatas merupakan ungkapan langsung makna dekonstruksi akuntansi

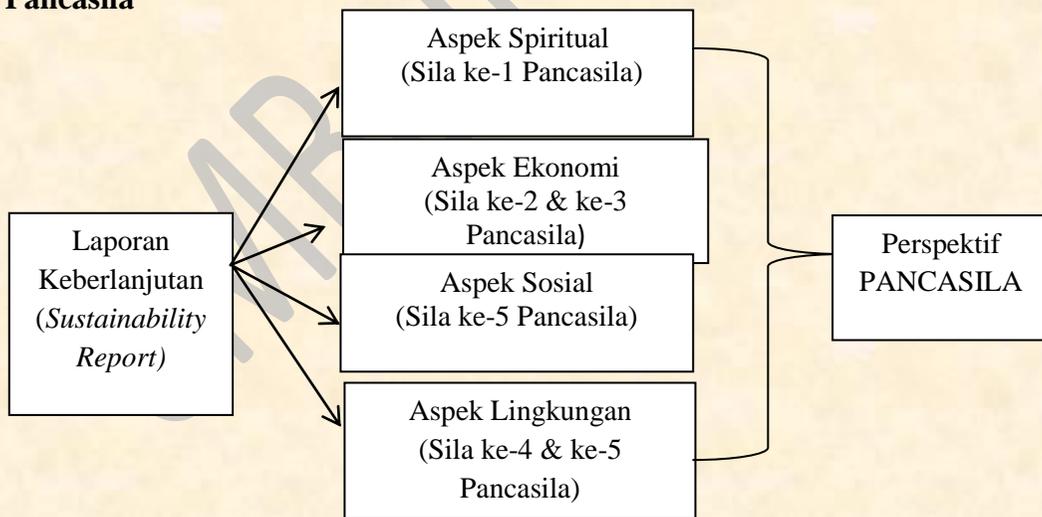
pertanggungjawaban sosial yang masih jauh dari sila-sila dalam perspektif Pancasila. Hal ini dikeluhkan oleh para informan yang juga merupakan praktisi/profesional di bidang akunting dan keuangan.

Para *Key-Informant* dan *Co-Informant* dalam wawancara dengan peneliti menyatakan bahwa perusahaan masih membuat laporan SR untuk melaporkan kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*) sebagai pencitraan perusahaan supaya terlihat “cantik” dan “sexy” untuk memperoleh reputasi baik di masyarakat. Kondisi ini dapat meningkatkan kepercayaan investor, sehingga mau membeli saham perusahaan tersebut.

Banyaknya investor yang membeli saham perusahaan tersebut akan meningkatkan nilai perusahaan, sehingga mampu meminimalisir risiko kejatuhan harga sahamnya. Laporan SR masih merupakan laporan sukarela (*voluntary*) sehingga banyak perusahaan yang tidak membuatnya. Hal ini menjadikan perusahaan tidak merasa wajib untuk melakukan pertanggungjawaban sosial terhadap *stakeholder*-nya, khususnya kepentingan masyarakat yang berada di sekitar perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan teori temuan (*substantive theory*) yang “*valid dan reliable*” di dunia nyata, berbasis data dan informasi menurut perspektif “*emic*” sebagai berikut:

**Teori Temuan (Substantive Theory)**

**Dekonstruksi Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial dalam Perspektif Pancasila**



**Gambar 2. Hasil Temuan**

Penjelasan:

Pada teori temuan tersebut, diperoleh dari hasil observasi langsung dan wawancara semi terstruktur. Melalui

*Key-informant* dan *Co-Informant* di beberapa perusahaan dan Kantor Akuntan Publik, maka dapat dipahami makna dan sebuah

dekonstruksi akuntansi pertanggungjawaban sosial dalam perspektif Pancasila yang melahirkan output laporan keberlanjutan (*Sustainability Reporting*).

Laporan keberlanjutan (*Sustainability Reporting*) yang sempurna adalah laporan yang sesuai dengan tujuan substatif, bukan hanya laporan untuk tujuan pencitraan/symbolik. Laporan keberlanjutan harus memuat beberapa aspek antara lain:

1. Aspek spiritual (mencerminkan sila ke-1 dari Pancasila), artinya perusahaan yang membuat laporan keberlanjutan wajib mendanai dan melaporkan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan spiritualitas *stakeholder*-nya (pegawai perusahaan, masyarakat, komunitas, vendor, dan sebagainya).
2. Aspek ekonomi (mencerminkan sila ke-2 dan ke-3 dari Pancasila), artinya perusahaan yang membuat laporan keberlanjutan wajib memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat di sekitar perusahaan (mencerminkan sila ke-2 dari Pancasila). Perusahaan juga wajib menjaga persatuan dan kesatuan semua suku dan komunitas yang berada di sekitar perusahaan, bukan mengadu domba antar suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Perusahaan juga wajib mempersatukan kepentingan perusahaan dan masyarakat sekitar perusahaan (mencerminkan sila ke-3 dari Pancasila).
3. Aspek sosial (mencerminkan sila ke-5 dari Pancasila), artinya perusahaan yang membuat laporan keberlanjutan wajib memenuhi keadilan sosial yang merata bagi seluruh kepentingan *stakeholder*-nya (pegawai perusahaan, masyarakat, komunitas, vendor, dan sebagainya).
4. Aspek lingkungan (mencerminkan sila ke-4 dan ke-5 dari Pancasila), artinya perusahaan yang membuat laporan keberlanjutan wajib memenuhi kebutuhan dan kepentingan pemangku kepentingan/*stakeholder*-nya (pegawai perusahaan, masyarakat, komunitas, vendor, dan sebagainya). Para pegawai perusahaan diperbolehkan untuk berorganisasi serta membentuk Serikat Pekerja (sesuai dengan sila ke-4 dari Pancasila). Apabila terjadi konflik antara perusahaan dan *stakeholder*-nya (pegawai perusahaan, masyarakat, komunitas, vendor, Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM dan sebagainya) maka perusahaan wajib mengedepankan solusi dengan musawarah untuk mencapai mufakat (sesuai dengan sila ke-4 dari Pancasila). Perusahaan juga wajib menyisihkan sebagian labanya untuk pelestarian lingkungan, hal ini sesuai sila ke-5 dari Pancasila.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ini, dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut: (1) Pemahaman para profesional/praktisi akunting dan keuangan terhadap laporan keberlanjutan (*sustainability reporting*) yang merupakan *outcome* dari akuntansi pertanggungjawaban sosial dalam perspektif Pancasila, merupakan suatu keharusan untuk diwujudkan dalam rangka penerapan tujuan substantif perusahaan yang bersangkutan.(2) Pemahaman profesional/praktisi akunting dan keuangan terhadap kesempurnaan pengungkapan laporan keberlanjutan yang merupakan *outcome* dari akuntansi pertanggungjawaban sosial dalam perspektif Pancasila, merupakan suatu kewajiban untuk memenuhi semua kebutuhan dan kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholder*-nya). (3) Pemahaman kondisi dan aspek spiritual, aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan harus diungkapkan dalam laporan keberlanjutan secara lengkap dan transparan, sehingga diketahui oleh semua pemangku kepentingannya.

#### Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian ini adalah: (1) Perlu diusulkan kepada pemerintah dalam hal ini, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk menetapkan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Reporting*) sebagai laporan wajib (*mandatory reporting*) dan bukan lagi sebagai laporan sukarela (*voluntary reporting*). Hal ini bertujuan agar penerapan akuntansi pertanggungjawaban sosial berdasarkan perspektif Pancasila dapat terwujud nyata. (2) Apabila

Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Reporting*) dijadikan sebagai laporan wajib (*mandatory reporting*), maka perusahaan yang tidak membuat Laporan Keberlanjutan berarti melanggar ketentuan ini harus diberikan sanksi yang tegas dalam bentuk denda yang jumlahnya materiil dan harus disetorkan ke pemerintah Republik Indonesia. (3) Perlu dilakukan sosialisasi di kalangan praktisi/profesional akunting dan keuangan dari semua perusahaan di Indonesia (PMA maupun PMDN) untuk pengungkapan Laporan Keberlanjutan yang lengkap dan transparan sesuai perspektif Pancasila.(4) Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan perpanjangan pengamatan untuk memahami efektivitas Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial (APS) dalam perspektif Pancasila terhadap Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Reporting*).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Achsin, M. (2006). Menyingkap: Dampak Positivisme Terhadap Esensi Penciptaan Manusia. *TEMA*, 7(1), 35-49.
- Carroll, A. B. (1999). Corporate Social Responsibility: Evolution of a definitional construct. *Business and Society* 38(3), 268-295
- Gunadi, T. (1995). *Ekonomi dan Sistem Ekonomi Menurut Pancasila dan UUD 1945* (Vol. 1). Bandung: Angkasa.

- Kamayanti, A. (2012). Cinta: Tindakan Berkesadaran Akuntan (Pendekatan Dialogis Dalam Pendidikan Akuntansi). *Simposium Nasional Akuntansi 15*. Banjarmasin.
- Leksono, Sonny. 2013. *Penelitian Kualitatif Ilmu ekonomi dari Metodologi ke Metode*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- McNair, C. J. (1990). Interdependence and control: Traditional vs. activity-based responsibility accounting. *Journal of Cost Management* (Summer): 15-23.
- Mubyarto. (1987). *Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan*. Jakarta: LP3ES.
- Mulawarman, A. D. (2008a). Pendidikan Akuntansi Berbasis Cinta: Lepas dari Hegemoni Korporasi Menuju Pendidikan yang Memberdayakan dan Konsepsi Pembelajaran yang Melampaui. *EKUITAS Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 12(1), 142-158.
- Sekaran, Uma (2006). *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Penerbit: Salemba Empat, Jakarta.
- Soekarno. (1964a). *Di bawah Bendera Revolusi*. Jakarta: Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi.
- Sukoharsono, E. G. (2010). Metamorfosis Akuntansi Sosial dan Lingkungan: Mengkonstruksi Akuntansi Sustainability Berdimensi Spiritualitas. *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*. Malang.
- Syafe'ie. (2000). *Konsep Ilmu Pengetahuan Dalam Al-Qur'an, Tela'ah dan Pendekatan Filsafat Ilmu*. Yogyakarta: UII Press.
- Triyuwono, I. (2012). *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi dan Teori* (2 ed.). Jakarta: Rajawali Pers.
- Wibisono, Y.( 2007). *Membeda Konsep dan Aplikasi CSR*, Fascho Publishing, Gresik. <https://maaw.info/ArticleSummaries/ArtsumMcNair90.htm>